



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	



PARIPURNA: Wakil Bupati Pandji Tirtayasa menyampaikan rancangan APBD 2020 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (30/10).

# APBD 2020 Defisit Rp217 Miliar

## RANCANGAN APBD 2020

Pendapatan Daerah Rp2,57 triliun

- PAD Rp764,52 miliar
- Dana Perimbangan Rp1,41 triliun
- Pendapatan lain Rp329,69 miliar

### Belanja Daerah

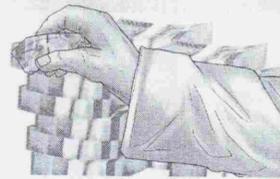
- Belanja tidak langsung Rp1,71 triliun
- Belanja langsung Rp1,07 triliun

### Belanja tidak langsung

- Gaji ASN, Kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta anggota DPRD Rp1,16 triliun
- Belanja hibah Rp72,16 miliar
- Bantuan sosial Rp19,50 miliar
- Bagi hasil untuk pemerintah desa Rp44,44 miliar
- Bantuan keuangan Rp412,73 miliar
- Dana tidak terduga Rp5 miliar

### Belanja Langsung

- Program kegiatan di setiap OPD, total Rp1,07 triliun



SERANG - Rancangan APBD Kabupaten Serang 2020 mengalami defisit Rp217 miliar. Estimasi anggaran belanja Rp2,79 triliun tidak seimbang dengan pendapatan daerah yang hanya Rp2,57 triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa pada rapat paripurna penyampaian raperda APBD 2020 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (30/10).

Pandji mengatakan, defisit itu dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten. Selain dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu. Pihaknya sengaja belum mencantumkan besaran anggaran dari luar APBD Kabupaten Serang. "Soalnya dari sa-

nanya belum ditetapkan berapa besarannya," katanya.

Pandji mengatakan, estimasi pendapatan daerah sebesar Rp2,57 triliun itu, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp764,52 miliar, dana perimbangan Rp1,41 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp329,69 miliar. Kemudian, untuk belanja daerah terbagi atas dua, yakni belanja tidak langsung Rp1,71 triliun dan belanja langsung Rp1,07 triliun.

Secara terperinci, ia memaparkan, belanja tidak langsung untuk gaji aparatur sipil negara (ASN), kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPRD sebesar Rp1,16 triliun. Kemudian, belanja hibah Rp72,16 miliar, bantuan sosial Rp19,50 miliar, bagi

hasil untuk pemerintah desa Rp44,44 miliar, bantuan keuangan Rp412,73 miliar, dan dana tidak terduga Rp5 miliar. "Alokasi belanja langsung untuk program kegiatan di setiap OPD yang totalnya Rp1,07 triliun," ujarnya.

Dikatakan Pandji, pihaknya belum memasukan anggaran dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan biaya operasional sekolah (BOS) ke dalam rancangan APBD 2020. karena, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. "Begitu juga dengan bantuan keuangan dari Pemprov Banten belum kita anggarkan karena pemprov belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD," ucapnya.

Pada rapat paripurna tersebut, juga

disampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyakit masyarakat, dan Raperda tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, Raperda tentang perencanaan pembangunan desa untuk menyelaraskan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Zaenal mengatakan, meskipun dana desa sudah digulirkan cukup lama, akan tetapi masih banyak desa yang membuat perencanaan pembangunannya belum sesuai. "Maka dari itu, raperda ini sebagai acuan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan," ujarnya. (jek/zee/ags)